

Pendampingan Nagari dalam Mewujudkan Transparansi dan Keterbukaan Informasi Publik

Ganefri Ganefri¹, Erianjoni Erianjoni^{2*}, Ahmaddul Hadi³, Mira Hasti Hasmira⁴

Alfajri Yusra⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Negeri Padang

*Corresponding author, e-mail: erianjonisosologi@gmail.com.

Abstrak

Program pendampingan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat Nagari VII Koto Talago dalam mengakses informasi publik secara lebih transparan dan akuntabel. Metode pelaksanaan melalui sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan langsung kepada kelompok masyarakat sebagai upaya memperkuat literasi informasi dan kemampuan advokasi warga. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman masyarakat mengenai hak atas informasi publik, terbentuknya kelompok peduli keterbukaan informasi, serta meningkatnya jumlah permohonan informasi resmi yang diajukan kepada pemerintah nagari. Program ini berkontribusi dalam membangun budaya transparansi di tingkat nagari dan memperkuat hubungan kolaboratif antara masyarakat dan pemerintah.

Kata Kunci: Keterbukaan Informasi Publik; Partisipasi Publik; Transparansi Nagari.

Abstract

This mentoring program aims to increase the understanding and participation of the community of Nagari VII Koto Talago in accessing public information in a more transparent and accountable manner. The implementation method includes outreach, training, and direct mentoring for community groups as an effort to strengthen information literacy and citizen advocacy skills. The results of the activities show a significant increase in community understanding of the right to public information, the formation of an information transparency group, and an increase in the number of official information requests submitted to the village government. This program contributes to building a culture of transparency at the village level and strengthening collaborative relationships between the community and the government.

Keywords: Public Information Disclosure; Public Participation; Village Transparency.

How to Cite: Ganefri, G. et al. (2025). Pendampingan Nagari dalam Mewujudkan Transparansi dan Keterbukaan Informasi Publik. *Abdi: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, 7(4), 1384- 1389.



This is an open access article distributed under the Creative Commons Share-Alike 4.0 International License. If you remix, transform, or build upon the material, you must distribute your contributions under the same license as the original. ©2025 by author.

Pendahuluan

Transparansi dan keterbukaan informasi publik merupakan prinsip dasar tata kelola pemerintahan yang baik. Meskipun regulasi nasional seperti UU No. 14 Tahun 2008 telah mengatur hak masyarakat atas informasi, implementasinya di tingkat nagari masih menghadapi tantangan, mulai dari rendahnya literasi informasi (Maidarnis, 2025), keterbatasan infrastruktur (Nagara & Maulana, 2025), hingga minimnya pemahaman perangkat nagari mengenai kewajiban layanan informasi (Luthfia & Malau, 2025).

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan keterbukaan informasi dipengaruhi oleh kualitas infrastruktur TIK, dukungan kelembagaan pemerintah daerah, literasi masyarakat, serta efektivitas kerangka hukum (Arrofi & Kawuryan, 2025). Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan KIP mempunyai korelasi positif dengan tingkat KIP di Indonesia. Provinsi dengan infrastruktur dan penggunaan TIK yang lebih baik cenderung memiliki tingkat transparansi informasi yang lebih tinggi (Azies & Dikaputra, 2024). Terlepas dari korelasi ini, keterampilan TIK tidak terkait erat dengan KIP, menunjukkan bahwa faktor-faktor lain, seperti literasi digital dan akses TIK yang adil, berperan dalam meningkatkan transparansi informasi publik. Undang-undang akses ke informasi yang kuat, yang mencakup pengungkapan proaktif dan reaktif, sangat penting untuk transparansi dan dapat bertindak sebagai perlindungan terhadap korupsi dan kesalahan pengelola (Raifangga et al., 2025).

Kualitas lembaga seperti peraturan daerah dan media yang digunakan untuk penyebaran informasi secara signifikan mempengaruhi pelaksanaan KIP di tingkat pemerintah daerah. Banyak nagari tidak memiliki infrastruktur dan sumber daya yang diperlukan untuk secara efektif menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik. Ini termasuk infrastruktur fisik dan sumber daya manusia yang mampu mengelola dan menyebarkan informasi. Seperti kurangnya kesadaran dan pemahaman di kalangan pejabat nagari tentang pentingnya transparansi dan hak atas informasi, yang menghambat pemerintahan yang efektif dan kepercayaan publik (Irsyadinnas et al., 2023).

Peran Informasi Publik dalam Pemerintahan Demokratis merupakan akses ke informasi publik berupaya untuk hak asasi manusia yang mendasar, penting untuk transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi warga negara dalam pemerintahan (Liambomba, 2023). Transparansi dalam administrasi publik sangat penting untuk membangun kepercayaan dan memastikan tata kelola yang bertanggung jawab. Ini memungkinkan warga untuk meneliti kegiatan pemerintah dan meminta pertanggungjawaban para pejabat (Rodrigues, 2023). Sementara kerangka hukum keterbukaan informasi publik di Indonesia kuat, implementasi praktis di tingkat nagari menghadapi beberapa rintangan (Helmi et al., 2021). Mengatasi tantangan ini membutuhkan peningkatan infrastruktur TIK, peningkatan literasi digital, dan menumbuhkan budaya transparansi di antara pejabat pemerintah daerah. Selain itu, memperkuat pengawasan kelembagaan dan memastikan ketersediaan sumber daya merupakan langkah penting untuk mencapai pengungkapan informasi publik yang efektif (Rosidah et al., 2023). Upaya ini tidak hanya akan meningkatkan tata kelola tetapi juga membangun kepercayaan dan kepuasan di antara warga negara. Namun, implementasi di level nagari masih minim intervensi pendampingan yang terstruktur untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, dan partisipasi masyarakat terkait hak informasi.

Transparansi di nagari tidak hanya menguntungkan masyarakat, tetapi juga pemerintah itu sendiri. Dengan keterbukaan, pemerintah nagari dapat membangun reputasi yang baik dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Ketika masyarakat merasa terlibat dan mendapatkan informasi yang jelas, mereka cenderung lebih mendukung program-program pemerintah dan berkontribusi dalam pembangunan nagari. Hingga saat ini, pendampingan nagari yang secara khusus berfokus pada peningkatan literasi keterbukaan informasi publik, penguatan kelompok masyarakat, dan fasilitasi permohonan informasi masih minim dilakukan di tingkat lokal. Tujuan pengabdian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman, kapasitas, dan partisipasi masyarakat Nagari VII Koto Talago dalam keterbukaan informasi publik melalui program sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan berbasis komunitas.

Metode Pelaksanaan

Kegiatan pendampingan dilaksanakan di Nagari VII Koto Talago melalui empat tahapan utama. Pertama, identifikasi kebutuhan dilakukan melalui wawancara awal (Zunaidi, 2024) dan observasi (Suswanto et al., 2019) untuk menentukan kelompok masyarakat yang relevan, seperti tokoh masyarakat, pemuda, dan organisasi lokal (Beri et al., 2025). Kedua, pengembangan materi sosialisasi disusun berdasarkan prinsip pemberdayaan masyarakat, komunikasi pembangunan, dan partisipasi publik. Materi mencakup hak masyarakat atas informasi, prosedur permohonan informasi, dan mekanisme pelayanan informasi nagari.

Tahap ketiga adalah pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pelatihan, yang dilakukan di aula nagari melalui workshop, diskusi kelompok, dan simulasi permohonan informasi. Instrumen berupa lembar

observasi, modul pelatihan, serta kuesioner survei pra–pasca digunakan untuk mengukur perubahan pengetahuan. Tahap keempat adalah pendampingan lanjutan, termasuk asistensi penyusunan permohonan informasi, pendampingan advokasi, dan monitoring respons pemerintah nagari. Evaluasi kegiatan dilakukan melalui survei pra–pasca, wawancara, dan observasi partisipatif untuk memastikan efektivitas program.

Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan pendampingan nagari melalui sosialisasi yang dibuka oleh ketua pengabdian bersama Wali Nagari VII Koto Talago. Pembukaan ini menandai komitmen bersama antara tim pelaksana dan pemerintah nagari dalam mendorong transparansi informasi publik serta meningkatkan partisipasi masyarakat yang disajikan pada gambar 1.



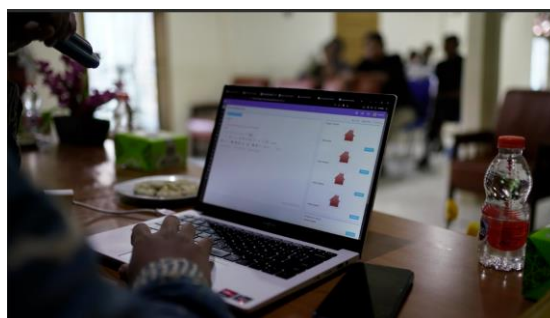
Gambar 1. Pembukaan Kegiatan oleh ketua Pengabdian dan wali nagari

Para peserta kegiatan pengabdian yang terdiri dari tokoh masyarakat, pemuda dan perwakilan organisasi lokal. Tingginya antusiasme peserta menunjukkan adanya kebutuhan dan minat besar terhadap peningkatan literasi informasi publik di nagari.



Gambar 2. Peserta kegiatan pengabdian

Para peserta kegiatan pengabdian dapat lihat pada gambar 2 yang terdiri dari tokoh masyarakat, pemuda, perempuan, dan perwakilan organisasi lokal. Tingginya antusiasme peserta menunjukkan adanya kebutuhan dan minat besar terhadap peningkatan literasi informasi publik di nagari. Selanjutnya sosialisasi dilakukan oleh narasumber mengenai informasi publik pada website nagari yang dapat di akses oleh semua perserta.



Gambar 3. Sumber Dok. Pelatihan Pengelolaan WEB

Sosialisasi pengelolaan web informasi nagari oleh narasumber dapat dilihat pada Gambar 3. Pada sesi ini, peserta diberikan pengetahuan untuk memahami struktur informasi, mengunggah konten, serta mengelola menu pelayanan informasi publik. Sosialisasi dan pelatihan ini bertujuan memperkuat kapasitas teknis perangkat nagari dan masyarakat dalam memanfaatkan Teknologi sebagai sarana transparansi. Terdapat peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam penggunaan website. Peserta merasa lebih percaya diri dalam menyampaikan aspirasi mereka kepada pemerintah.



Gambar 4. Website Nagari VII Koto Talago

Gambar 4 menampilkan website informasi Nagari VII Koto Talago yang telah dikelola secara lebih baik setelah pelatihan. Website ini menjadi media utama penyebaran informasi publik, termasuk dokumen anggaran, laporan kegiatan, dan layanan permohonan informasi. Pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan keterbukaan informasi publik menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman dan partisipasi masyarakat. Berdasarkan survei, terjadi peningkatan pengetahuan peserta dari sebelum kegiatan menjadi setelah kegiatan. Temuan ini mencerminkan keberhasilan metode sosialisasi dan pelatihan dalam memperkuat literasi masyarakat terkait hak atas informasi publik.

Pembahasan

Hasil yang diperoleh menunjukkan dampak positif terhadap masyarakat dan pemerintah nagari. Peningkatan kesadaran masyarakat merupakan langkah awal yang penting dalam menciptakan budaya transparansi. Ketika masyarakat menyadari hak-hak mereka, mereka cenderung lebih aktif dalam mengawasi dan mengadvokasi keterbukaan informasi. Pembentukan kelompok peduli keterbukaan informasi memberikan wadah bagi masyarakat untuk bersuara. Dengan adanya kelompok ini, masyarakat tidak lagi pasif menerima informasi, tetapi berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan. Ini juga memperkuat jaringan sosial yang mendukung kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Hal ini sejalan dengan temuan (Zellatifanny et al., 2021) mengenai pentingnya literasi informasi dalam meningkatkan partisipasi publik.

Kesadaran publik akan hak informasi secara signifikan berdampak pada partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan (Tumanggor & Szali, 2025). Ketika warga diberitahu, mereka lebih cenderung terlibat dalam proses tata kelola, sebagaimana dibuktikan oleh penelitian yang menunjukkan korelasi positif antara kesadaran informasi publik dan partisipasi di Indonesia (Werimon, 2005). TIK memainkan peran penting dalam meningkatkan keterbukaan informasi publik. Provinsi dengan infrastruktur TIK yang lebih baik cenderung memiliki tingkat transparansi informasi publik yang lebih tinggi, yang mendukung keterlibatan warga yang aktif (Azies & Dikaputra, 2024). Transparansi pemerintahan demokratis, memungkinkan warga untuk memahami dan memantau keputusan kebijakan publik. Transparansi ini menumbuhkan kepercayaan pada lembaga-lembaga publik dan mendorong partisipasi warga negara (Androniceanu, 2021).

Responsivitas ini mendukung argumen (Aprilla et al., 2024) bahwa akses informasi merupakan elemen penting dalam meningkatkan akuntabilitas pemerintah. Pemanfaatan website nagari sebagai media transparansi memperkuat temuan bahwa teknologi informasi berperan signifikan dalam keterbukaan informasi publik. Temuan ini menunjukkan pentingnya dukungan kelembagaan yang lebih kuat, sesuai dengan (Irsyadinnas et al., 2023) yang menekankan bahwa kapasitas kelembagaan merupakan faktor penentu keberhasilan implementasi keterbukaan informasi publik.

Pembentukan kelompok peduli keterbukaan informasi berperan penting dalam mendorong perubahan sosial di nagari. Kelompok ini berfungsi sebagai agen advokasi yang membantu masyarakat memahami serta memanfaatkan hak atas informasi. Menurut Ahmadi et al., (2019) yang menyatakan bahwa partisipasi berbasis komunitas dapat meningkatkan efektivitas pengawasan pemerintah. Program ini tidak hanya mendorong keterbukaan informasi, tetapi juga memperkuat hubungan antara masyarakat dan pemerintah. Dalam jangka panjang, diharapkan budaya transparansi ini dapat terus tumbuh dan melahirkan nagari yang

lebih partisipatif, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan warganya. Melalui inisiatif ini, diharapkan keterbukaan informasi dapat menjadi bagian integral dari tata kelola pemerintahan di nagari, menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pembangunan yang berkelanjutan.

Kesimpulan

Program pendampingan keterbukaan informasi publik di Nagari VII Koto Talago meningkatkan pemahaman, kapasitas, dan partisipasi masyarakat dalam mengakses informasi publik. Melalui sosialisasi kepada masyarakat menunjukkan peningkatan signifikan dalam literasi informasi, keberanian mengajukan permohonan informasi, serta dapat menyampaikan aspirasi kepada pemerintah nagari. Keterbukaan informasi menjadi capaian strategis yang dapat memperkuat keberlanjutan program di tingkat lokal. Serta respons positif pemerintah nagari mencerminkan adanya perbaikan dalam implementasi keterbukaan informasi publik. Program ini juga menghasilkan perubahan pola komunikasi antara masyarakat dan pemerintah nagari, dari yang sebelumnya pasif menjadi lebih kolaboratif. Pendampingan dapat menjadi pendekatan efektif dalam mendorong transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan yang partisipatif.

Ucapan Terimakasih

Penulis menyampaikan penghargaan yang tinggi dan terimakasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Negeri Padang yang telah membiayai pengabdian ini dengan nomor kontrak pengabdian 423/UN35/PM/2024.

Daftar Pustaka

- Al Azies, H., & Dikaputra, I. B. (2024). The Relationship Between Public Information Openness And Ict Development. *Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan*, 12(2).
- Androniceanu, A. (2021). Transparency in public administration as a challenge for a good democratic governance. *Revista: Administratie si Management Public (RAMP)*, (36), 149-164.
- Aprilla, W., Wulandari, M., & Elcaputera, A. (2024). Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Melalui Teknologi Digital dan Partisipasi Publik dalam Upaya Pemberantasan Korupsi. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, 2(4), 321-334.
- Arrofi, M. I., & Kawuryan, M. W. (2025). Implementasi Website Ppid Kabupaten Aceh Barat Daya Dalam Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik. *Institut Pemerintahan Dalam Negeri*.
- Beri, D., Ofianto, O., Febriani, E. A., Wafiyah, E. I., Yusra, A., & Sudiar, O. (2025). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pendampingan Pengelolaan Sampah di Nagari Sulit Air Kabupaten Solok. *Abdi: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, 7(3), 814-822.
- Helmi, R. F., Permana, I., & Yuliarti, Y. (2021). Pembentukan PPID Nagari Sebagai Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. *Abdi: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, 3(1), 28-38.
- Irsyadinnas, I., Ningrum, S., & Priyatna, C. C. (2023). Development of the implementation of public information disclosure by regional governments in Indonesia: a systematic literature review. *JPPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 9(2), 1091-1103.
- Liambomba, D. Y. (2023). The right of access to public information: human rights issues, transparency and good governance. *Constitutionale*, 4(1), 1-28.
- Luthfia, R., & Malau, H. (2025). Kendala Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Nagari (BPN) Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Nagari di Nagari Talang Babungo Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 6(1).
- Maidarnis, M. (2025). Kewenangan Wali Nagari Dalam Demokrasi Lokal Studi Kasus Nagari Batu Bulek Kecamatan Lintau Buo Utara. *UIN Mahmud Yunus Batusangkar*.
- Nagara, A. S., & Maulana, R. I. (2025). Strukturasi dan Penguatan Ketahanan Desa: Tinjauan Hukum Atas Implementasi Sistem Pemerintahan Desa Berbasis Elektronik. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 7(1), 150-179.
- Rachmiatie, A. (2019). Public participation model for public information disclosure. *Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication*. 2(1).

-
- Raifangga, M. C., Husnayain, N., Rahmatussalimah, R., Hasibuan, S. C., Masyropah, S., Sarah, S., & Latifah, A. (2025). Peran Media dan Partisipasi Publik dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pejabat Publik terhadap Praktik Korupsi di Indonesia. *Jurnal Penelitian Inovatif*, 5(1), 529-538.
- Rodrigues, J. G. (2022). Publicity, Transparency, and Openness in Public Administration. *Revista de Derecho*, (58), 9-37.
- Rosidah, I., Kesumah, P., & Rizka, R. B. (2023). Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pencegahan Fraud Diinstansi Pemerintah (Studi Kasus Kantor Kec. Ciwidey). *Jurnal Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi: EMBA*, 2(1), 137-156.
- Suswanto, B., Windiasih, R., Sulaiman, A. I., & Weningsih, S. (2019). Peran Pendamping Desa Dalam Model Pemberdayaan Masyarakat Berkelanjutan. *JUSS (Jurnal Sosial Soedirman)*, 2(2), 40-60.
- Tumanggor, T., & Sazali, H. (2025). Etika Regulasi dan Kebijakan Media Digital: Meningkatkan Kesadaran Publik di Era Informasi. *Jurnal Indonesia: Manajemen Informatika dan Komunikasi*, 6(3), 1657-1669.
- Werimon, S. (2005). Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) (Study Empiris di Provinsi Papua). Universitas Diponegoro.
- Zellatifanny, C. M., Rumata, V. M., & Sakinah, A. M. (2021). The impact of public information awareness and service towards public engagement. *Jurnal Studi Komunikasi*, 5(2), 439-452.
- Zunaidi, A. (2024). Metodologi Pengabdian Kepada Masyarakat Pendekatan Praktis untuk Memberdayakan Komunitas. IAIN Kediri